

ANALISIS TERHADAP KEGAGALAN REFERENDUM CATALUNYA (*The Rights of Self Determination*) TERHADAP SPANYOL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN KONSTITUSI SPANYOL 1978

Charel Benindra Manurung, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yulianti

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail: charelsenindra@gmail.com , dewamangku.undiksha@gmail.com,
raiyulianti@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mengkaji terkait penyebab Catalunya ingin memisahkan diri dari Spanyol, dan pandangan hukum internasional, serta konstitusi Spanyol 1978 terhadap kegagalan referendum penentuan nasib sendiri Catalunya. Guna menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder mengenai analisa dari perspektif hukum internasional dan konstitusi Spanyol 1978 terkait kegagalan referendum Catalunya. Melalui metode penelitian tersebut kemudian diperoleh hasil bahwa Catalunya ingin memisahkan diri dari Spanyol ditimbulkan oleh kombinasi dari masalah hak otonomi, ekonomi serta sejarah. Catalunya menginginkan otonomi yang lebih besar dan menuduh sistem kebijakan fiskal di Spanyol akan menghambat kemajuan Catalunya. Konstitusi Spanyol 1978 memandang bahwa Pemerintah Spanyol memiliki kewenangan untuk menjaga kesatuan Spanyol dan hukum internasional memandang bahwa referendum penentuan nasib sendiri dapat dilakukan namun harus menghormati dan memenuhi semua persyaratan yang tertuang baik pada konstitusi negara maupun instrumen hukum internasional.

Kata Kunci : Hak, Referendum, Pemisahan diri .

Abstract

This research aims to find out, analyze, and examine the causes of Catalonia wanting to separate from Spain, and the views of international law, as well as the 1978 Spanish constitution on the failure of the Catalonia self-determination referendum. In order to answer the formulation of the problem in this study, the method of normative legal research was used, namely research conducted by examining literature and secondary data regarding analysis from the perspective of international law and the 1978 Spanish constitution regarding the failure of the Catalonia referendum. Through this research method, the result was that Catalonia's desire to separate from Spain was caused by a combination of issues of autonomy, economic and historical rights. Catalonia wants greater autonomy and accuses Spain's fiscal policy system of only hindering Catalonia's progress. The 1978 Spanish Constitution considers that the Government of Spain has the authority to maintain the unity of Spain and international law views that a referendum on self-determination can be carried out but must respect and fulfill all the requirements contained in both the country's constitution and international legal instruments.

Keywords : Rights, Referendum, Secession.

PENDAHULUAN

Hukum Internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan antar negara. Hukum internasional juga dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur entitas berskala internasional. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, antara negara dengan negara, dan negara dengan subjek hukum lain, bukan negara atau subjek bukan negara satu sama lain. Subjek hukum internasional sendiri adalah segala hal yang berdasarkan hukum dapat memiliki hak serta kewajiban, dan memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan hukum maupun bertindak menurut ketentuan hukum internasional yang ada dan berlaku (Kusumaatmadja, 2016:67).

Hak untuk menentukan nasib sendiri (*The Rights of Self Determination*) muncul ke permukaan seiring dengan meningkatnya tuntutan atas pemerintahan yang didasarkan pada kedaulatan rakyat, yang dimulai dengan Deklarasi Kemerdekaan Amerika (1776), dan Revolusi Perancis (1789) (Raic, 2002:173). Ungkapan *The Right of Self-Determination* sering dipahami sebagai hak sebuah kelompok atau “bangsa” untuk menentukan nasib sendiri yang pada titik ekstrim sering dikaitkan dengan konteks perjuangan untuk mencapai kemerdekaan atau kelahiran sebuah negara dengan memisahkan diri. James Anaya membedakan antara mode penentuan nasib sendiri yang berbeda, dengan melihat dua model spesifik:

1. Penentuan nasib sendiri yang konstitutif, “dimana orang memutuskan status masa depan mereka, memilih atau menolak pemisahan diri, seperti yang telah dilakukan oleh Skotlandia, Sudan Selatan dalam referendum kemerdekaan seperti yang terjadi di Skotlandia, Sudan Selatan dan Montenegro belakangan ini (dua diantara negara tersebut berakhir mendapatkan kemerdekaan).
2. Penentuan nasib sendiri yang sedang berlangsung’, “dimana suatu kelompok menjalankan tingkat kontrol politik atas rakyat dan/atau wilayahnya sendiri, meskipun tidak harus melalui kemerdekaan penuh seperti yang dilakukan oleh negara-negara konstituen Inggris, atau federal subjek negara federal seperti Rusia atau Amerika Serikat” (Anaya, 2004:99).

Perjuangan Catalunya untuk mendapatkan kemerdekaan telah menjadi perjuangan yang berat bagi penduduk Catalunya. Dimulai pada 11 September 1714, ketika sukseksi Spanyol saat berhasil menaklukkan wilayah Catalunya. Sebelum abad ke XVIII Kerajaan Aragon ada, terdapat perbatasan yang terdiri dari Kepulauan Balearic, Valencia, Catalunya, dan Aragon. Namun pada tahun 1701 ketika sukseksi Spanyol dimulai, perbatasan ini mulai hilang saat orang Spanyol datang untuk menaklukkan wilayah mereka. Pada tahun 1713, Kampanye Catalunya dimulai dengan tujuan mengambil kembali wilayah Catalunya, yang mengakibatkan pengepungan Barcelona yang terkenal pada tanggal 11 September 1714 (Canetti, 2021). Berbagai alasan menyelubungi keinginan Catalunya untuk memisahkan diri dari Spanyol, antara lain :

1. Sistem fiskal Spanyol yang menghambat pembangunan serta kemajuan Catalunya melalui tarif pajak yang sangat tinggi dengan pengembalian yang kecil, maka dari itu, banyak orang Catalunya percaya bahwa tanpa Spanyol mereka akan jauh lebih makmur karena dapat mempertahankan kekayaan mereka untuk diinvestasikan kembali ke kota.
2. Catalunya menginginkan Otonomi yang lebih besar.
3. Spanyol yang merupakan negara berbentuk Monarki Parlemen dimana Catalunya selalu menginginkan sebuah negara berbentuk republik dalam bentuk desentralisasi.
4. Rakyat Catalunya merasa bahwa mereka sudah memiliki segalanya untuk dapat membentuk sebuah negara, antara lain Bahasa mereka sendiri, budaya mereka sendiri yang sudah ada lebih dari 800 tahun lamanya.

Jika merujuk dari Konvensi Montevideo tahun 1933, terdapat syarat- syarat yang harus dimiliki suatu bangsa sebagai bagian dari dunia internasional, unsur tersebut ada yang bersifat mutlak atau konstitutif dan tambahan atau deklaratif. Unsur konstitutif merupakan syarat mutlak

yang harus ada, jika tidak, maka suatu negara tidak akan ada. Unsur dari negara menurut Konvensi Montevideo tahun 1933 yaitu :

1. Rakyat (*Permanent Population*).
2. Wilayah (*A Defined Territory*).
3. Pemerintah (*A Government*).
4. Kemampuan. Mengadakan hubungan dengan negara lain (*A Capacity to enter into relations with other states*).

Adapun data yang dihasilkan sehari setelah referendum yang dilakukan pada 1 Oktober 2017 menyebutkan, bahwa 2.044.038 suara atau 92,01 persen menginginkan kemerdekaan Catalunya. 7,99 persen suara atau 177.547 suara tetap ingin bersama sedangkan 2,83 persen atau 64.632 suara dinyatakan tidak sah. Berdasarkan undang-undang yang disetujui oleh parlemen Catalunya, hasil dari referendum seharusnya diumumkan dan dilaksanakan dua hari setelah pemungutan suara. Pada 3 Oktober (Vila, 2022).

Di tengah momen krusial ini, otoritas Spanyol memanfaatkan momentum gagal dari para Pemimpin pro-kemerdekaan tanpa keraguan sedikitpun. Raja Philip VI dalam pidato yang disampaikan di malam yang sama menuduh pemerintah Catalunya “tidak setia kepada negara” dan telah melanggar Konstitusi Spanyol tahun 1978 yang mengacu kepada “Kesatuan Bangsa Spanyol Yang Tak Terpisahkan” karena meminta kekuasaan negara untuk menerapkan kembali tatanan konstitusional di Catalunya. Jaksa Agung Jose Manuel Maza menambahkan akan melakukan tuntutan pidana terhadap pejabat Catalunya yang bertanggung jawab untuk menjadwalkan referendum 1 Oktober. Para pejabat dapat didakwa, atas ketidaktaatan, penyalahgunaan kekuasaan, dan penggelapan. Selain melanggar Konstitusi Spanyol, Hal ini juga diperkuat dengan kemerdekaan Catalunya yang tidak mendapatkan pengakuan dari hampir semua negara berdaulat PBB. Namun, negara-negara non anggota PBB yang diakui sebagai Abkhazia dan Ossetia Selatan mengklaim bahwa mereka bersedia menawarkan pengakuan formal jika mereka menerima permintaan untuk melakukannya dari pemerintah Catalunya (Vila, 2022).

Terlepas dari situasi politik yang sedang berlangsung, para aktivis pro-kemerdekaan tetap percaya diri dengan kepemimpinan mereka. Namun setelah pidato Presiden Puigdemont pada tanggal 10 Oktober 2017, kepercayaan diri mereka runtuh. Pemerintah Catalunya diwakili oleh Presiden Catalunya Carles Puigdemont di depan Parlemen di Barcelona mengusulkan untuk menengguhkan hasil Referendum kemerdekaan Catalunya (Jones, 2017). Pengadilan Konstitusional telah menyatakan bahwa referendum yang dilakukan tidak sesuai dengan konstitusi Spanyol dan akan berakibat pada pelanggaran konstitusi negara. Carles Puigdemont bersama mitra koalisinya kembali mendeklarasikan kemerdekaan Catalunya pada 27 Oktober, namun Deklarasi ini tidak diakui oleh negara berdaulat manapun, termasuk Spanyol. Pemerintahan Catalunya menjadi tersebar, Puigdemont dan setengah dari menteri di Catalunya pergi ke pengasingan di Brussel, Belgia. Oriol Junqueras sendiri menyerahkan diri kepada pemerintah Spanyol dan ditahan di penjara hingga Juni 2021 (Tara, 2017).

Spanyol mengambil kendali langsung atas pemerintahan Catalunya. Tidak ada panggilan untuk melawan dari otoritas Catalunya. Beberapa pejabat pro-kemerdekaan kehilangan pekerjaan, tetapi banyak tokoh tinggi pemerintah pro-kemerdekaan sebelumnya mempertahankan posisinya dan aktif bekerja sama dengan Madrid. Pere Aragonès, seorang politisi pro-kemerdekaan yang kini menjadi presiden Catalunya, menghabiskan periode ini sebagai wakil presiden dan Menteri Ekonomi dan Keuangan (Vila, 2022).

Berkaca dari ditanggungkannya hasil dari referendum kemerdekaan Catalunya, referendum ini pada dasarnya ilegal. Dan telah melanggar Konstitusi Spanyol tahun 1978. Namun di lain sisi Hukum Internasional melihat bahwa Catalunya dapat memisahkan diri dan membentuk suatu negara secara independen atas dasar penuntutan hak untuk menentukan nasib sendiri yang tercantum pada pasal I dan II *International Covenant on Civil and Political Rights* dan Pemenuhan semua unsur pembentukan negara yang terdapat pada Konvensi Montevideo 1933 untuk memisahkan diri dan membentuk suatu negara, namun terhalang oleh Konstitusi Spanyol

yang tidak mengakui akan hak menentukan nasib sendiri (*The Rights of Self Determination*). Kegagalan Catalunya dalam meraih kemerdekaan melalui penentuan nasib sendiri masih menjadi perdebatan yang tidak menemui ujung, dan meninggalkan rakyat Catalunya dengan harapan semata.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, terdapat ketertarikan untuk menganalisis kegagalan referendum Catalunya dalam menerapkan prinsip *Rights Of Self Determination* terhadap Spanyol ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional dengan mengambil judul : “Analisis Terhadap Kegagalan Referendum Catalunya (*The Rights Of Self Determination*) Terhadap Spanyol Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional Dan Konstitusi Spanyol 1978”.

METODE PENELITIAN

Proses penelitian hukum memerlukan metode penelitian yang akan menunjang hasil dari penelitian tersebut. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian, dengan jenis penelitian yakni penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara mengkaji suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang digunakan dalam suatu permasalahan hukum tertentu. Tidak hanya perundang-undangan tapi juga pengumpulan data dengan jenis penelitian normatif ini dapat menggunakan bahan pustaka lainnya (Marzuki, 2010:35). Dalam penelitian ini akan dikaji lebih dalam mengenai Analisis kegagalan referendum Catalunya (*The rights of self determination*) terhadap Spanyol yang ditinjau dari perspektif hukum internasional dan Konstitusi Spanyol 1978.

Terdapat tiga jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Dalam penelitian ini akan ditelaah mengenai pengaturan hukum terkait keinginan Catalunya untuk memisahkan diri terhadap Spanyol. Kemudian pendekatan historis (*Historical Approach*) yang dilakukan untuk mendapatkan penelitian yang lebih objektif. Penelaahan serta sumber – sumber lain yang berisi tentang informasi – informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis, atau dalam kata lain penelitian yang mendeskripsikan gejala tetapi bukan yang terjadi pada saat atau waktu penelitian dilakukan. Kemudian pendekatan konseptual dimana pendekatan ini akan memperjelas berbagai ide dan juga memberikan pengertian hukum, konsep hukum maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Secara khusus dalam penelitian ini yaitu berbagai pandangan dan doktrin tentang hukum internasional yang mengatur tentang hak penentuan nasib sendiri (*Rights of Self Determination*) berdasarkan beberapa instrumen hukum internasional.

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari bahan hukum primer di dapat dari Pasal 2 Resolusi Umum PBB No 1514, Pasal 1 Deklarasi PBB, , dan instrument hukum lainnya yang berkaitan dengan Hak untuk memisahkan diri (*The Rights of Self Determination*). Kemudian bahan hukum sekunder yang didapat dari buku-buku, dan pendapat para ahli yang kompeten. Serta bahan hukum tersier yang merupakan bahan hukum penunjang dan pendukung yang berupa data-data yang disortir secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan mengenai pemisahan wilayah yang dilakukan oleh Catalunya melalui referendum penentuan nasib sendiri dan juga pengaturan hukum terkait. Teknis analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Catalunya Menuntut Atas Pemisahan Diri (*Rights of Self Determination*) Terhadap Spanyol

1. Pengaturan Atas Pemberian Otonomi Terhadap Catalunya

Sejarah dan perkembangan masalah otonomi Catalunya dapat ditelusuri kembali ke beberapa abad dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang kompleks antara Catalunya dan seluruh Spanyol. Secara historis, Catalunya adalah negara merdeka dengan bahasa, budaya, dan hukumnya sendiri hingga awal abad ke-18, ketika menjadi bagian dari Kerajaan Spanyol setelah Perang Sukseksi Spanyol. Menyusul aneksasi, Catalunya kehilangan otonominya dan menjadi sasaran kekuasaan mahkota Spanyol, yang berusaha memaksakan kekuasaan terpusatnya atas wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan ketegangan lama antara Catalunya dan pemerintah Spanyol atas masalah pemerintahan sendiri, identitas budaya, dan representasi politik (Hannum, 1980:858).

Selama abad ke-20, Catalunya mengalami kebangkitan budaya dan politik yang signifikan, ditandai dengan kebangkitan nasionalisme Catalan dan advokasi otonomi yang lebih besar. Namun, gerakan ini mendapat perlawanan dan represi dari pemerintah Spanyol, khususnya selama kediktatoran Franco (1939-1975), yang menindas bahasa, budaya, dan identitas Catalunya. Kediktatoran Francisco Franco berdampak signifikan pada otonomi Catalunya, karena menekan bahasa, budaya, dan identitas Catalan, dan kekuasaan terpusat di Madrid. Selama rezim Franco, yang berlangsung dari tahun 1939 hingga 1975, Catalunya menjadi sasaran kebijakan "Kastilianisasi", yang bertujuan menghapus identitas Catalunya dan mempromosikan nasionalisme Spanyol (Adhinata, 2018:9).

Rezim Franco menghapus otonomi Catalunya dan menekan bahasa, budaya, dan tradisi Catalunya. Penggunaan bahasa Catalan dilarang di ruang publik, dan buku, surat kabar, dan institusi budaya Catalunya disensor atau ditutup. Pemimpin Catalunya dianiaya, dipenjara, atau diasingkan, dan banyak nasionalis Catalunya dieksekusi atau disiksa. Rezim juga melakukan proyek infrastruktur berskala besar, seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga air Montserrat, yang bertujuan untuk mengintegrasikan Catalunya ke dalam ekonomi Spanyol dan melemahkan identitas khususnya (Adhinata, 2018:8).

Statuta Otonomi Catalunya merupakan hasil dari proses panjang negosiasi dan kompromi antara pemerintah Spanyol, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Adolfo Suárez, dan partai politik Catalunya, yang diwakili oleh Parlemen Catalunya. Undang-undang tersebut menetapkan kerangka kerja untuk organisasi politik, administrasi, dan fiskal Catalunya dan memberikan kekuasaan kepada pemerintah Catalunya untuk mengatur berbagai bidang kebijakan, termasuk pendidikan, kesehatan, budaya, dan keselamatan publik. Otonomi yang diberikan kepada Catalunya di bawah undang-undang 1979 memiliki jangkauan yang luas tetapi masih terbatas dalam beberapa hal. Misalnya, pemerintah Spanyol mempertahankan kendali atas isu-isu seperti urusan luar negeri, pertahanan, dan peradilan, dan beberapa politisi dan aktivis Catalunya merasa bahwa undang-undang tersebut tidak cukup untuk memenuhi tuntutan mereka akan otonomi yang lebih besar dan pengakuan identitas Catalunya. (Cataloniavotes, 2014).

Dalam beberapa dekade setelah undang-undang 1979, otonomi Catalunya diperluas melalui amandemen undang-undang dan melalui reformasi legislatif dan konstitusional lainnya. Namun, ketegangan antara Catalunya dan negara Spanyol tetap ada, dan banyak orang Catalunya terus mendorong otonomi yang lebih besar dan bahkan kemerdekaan. Warisan undang-undang 1979 dan dampaknya terhadap otonomi Catalunya tetap menjadi bagian penting dari perdebatan yang sedang berlangsung mengenai masa depan politik Catalunya. Undang-undang tersebut mengakui Catalonia sebagai sebuah kebangsaan dan memberikan wilayah tersebut kekuasaan yang signifikan atas pendidikan, budaya, kesehatan, dan ketertiban umum. Namun, banyak orang Catalunya masih merasa bahwa otonomi mereka terbatas dan bahwa pemerintah Spanyol tidak berbuat cukup untuk mengatasi keluhan ekonomi, budaya, dan politik mereka. Sementara Statuta

Otonomi 1979 memberikan Catalunya gelar pemerintahan sendiri dan pengakuan atas identitas budaya dan bahasanya yang berbeda, banyak orang Catalan tidak sepenuhnya puas dengan tingkat otonomi yang diberikan oleh undang-undang tersebut. Ada beberapa alasan ketidakpuasan ini (Germa, 2014:8).

Pertama, beberapa partai politik dan aktivis Catalan percaya bahwa undang-undang tersebut tidak cukup jauh dalam mengakui identitas nasional Catalonia yang berbeda.

Kedua, beberapa orang Catalan tidak puas dengan hubungan ekonomi antara Catalunya dan negara Spanyol.

Terakhir, ada kekhawatiran di antara beberapa partai politik dan aktivis Catalan tentang peran pemerintah Spanyol dalam urusan Catalunya. (Germa, 2014:8).

Pada tahun 2006, parlemen Spanyol dan Catalunya menyetujui Statuta Otonomi baru, yang memperluas kekuasaan Catalunya dan mengakui Catalunya sebagai bahasa resmi. Namun, undang-undang tersebut kemudian ditentang oleh Partai Populer yang konservatif, yang berpendapat bahwa undang-undang tersebut melanggar konstitusi Spanyol. Pada tahun 2010, Mahkamah Konstitusi Spanyol memutuskan bahwa beberapa ketentuan utama undang-undang tersebut tidak konstitusional, yang memicu protes dan kebencian di antara warga Catalunya. Pada tahun-tahun setelah keputusan tersebut, gerakan kemerdekaan Catalunya memperoleh momentum, didorong oleh rasa marginalisasi ekonomi dan budaya, serta keinginan untuk pemerintahan sendiri yang lebih besar. Gerakan tersebut memuncak pada referendum kemerdekaan 2017, yang dinyatakan ilegal oleh pemerintah Spanyol, dan menyebabkan periode ketidakstabilan politik, represi, dan kerusuhan (Preston, 2018:5). Secara keseluruhan, masalah otonomi Catalunya adalah masalah yang kompleks dan mengakar, dibentuk oleh faktor sejarah, budaya, ekonomi, dan politik selama berabad-abad. Ini mewakili ketegangan antara keinginan rakyat Catalunya untuk otonomi yang lebih besar dan pemerintahan sendiri dan komitmen pemerintah Spanyol untuk menjaga persatuan dan kedaulatan negara Spanyol.

2. Pengaturan Atas Kebijakan Fiskal Oleh Spanyol Yang Membatasi Otonomi Catalunya

Masalah kebijakan fiskal telah menjadi faktor penting dalam gerakan kemerdekaan Catalunya. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa orang Catalan berpendapat bahwa pendapatan pajak wilayah tersebut didistribusikan secara tidak adil, dengan terlalu banyak uang masuk ke pemerintah Spanyol dan tidak cukup untuk tinggal di Catalunya. Di bawah sistem saat ini, Catalunya menyumbangkan sejumlah besar pendapatan pajak ke negara Spanyol, tetapi menerima lebih sedikit dana sebagai imbalan daripada wilayah lain di Spanyol. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan ekonomi di antara beberapa orang Catalunya yang percaya bahwa wilayah mereka dieksploitasi oleh pemerintah Spanyol (Mehreen, 2017).

Salah satu isu utama adalah bagaimana pendapatan pajak didistribusikan antara pemerintah pusat dan daerah otonom adalah Pemerintah Spanyol mengumpulkan sebagian besar pajak, termasuk pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai (PPN), dan kemudian mendistribusikan sebagian dari pendapatan tersebut ke daerah otonom. Namun, rumus yang digunakan untuk menentukan berapa banyak yang diterima setiap daerah didasarkan pada sejumlah faktor, termasuk jumlah penduduk dan pendapatan per kapita, bukan pada pendapatan pajak aktual yang dihasilkan di setiap daerah. Kaum nasionalis Catalan berpendapat bahwa formula ini tidak adil bagi Catalunya, karena wilayah tersebut menghasilkan pendapatan pajak yang signifikan tetapi tidak menerima jumlah dana yang proporsional sebagai imbalannya. Mereka berpendapat bahwa Catalunya harus memiliki kendali lebih besar atas pendapatan pajaknya sendiri dan diizinkan menyimpan lebih banyak uang yang dihasilkannya, daripada harus bergantung pada pemerintah Spanyol untuk pendanaan (Broner, 2018:11).

Salah satu cara utama dimana kebijakan fiskal Spanyol membatasi otonomi Catalunya adalah melalui sistem pembiayaan daerah negara itu. Di bawah sistem ini, pajak dikumpulkan oleh pemerintah pusat dan kemudian didistribusikan kembali ke daerah berdasarkan formula yang memperhitungkan faktor-faktor seperti jumlah penduduk, aktivitas ekonomi, dan kebutuhan

sosial. Sementara sistem ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua daerah menerima pembagian dana yang adil, Catalunya telah lama berargumen bahwa mereka menerima lebih sedikit dana daripada haknya. Wilayah ini juga mengkritik kurangnya transparansi dan kerumitan sistem, dan menyerukan kontrol yang lebih besar atas keuangannya sendiri. Bentuk yang lain dimana kebijakan fiskal Spanyol membatasi otonomi Catalunya adalah melalui perpajakan terpusat. Pemerintah Spanyol memiliki kekuatan untuk menetapkan tarif pajak dan memungut pajak atas nama semua wilayah, yang berarti Catalunya tidak dapat menetapkan tarif pajaknya sendiri atau memungut pajaknya sendiri secara mandiri. Hal ini telah membatasi kemampuan daerah untuk meningkatkan pendapatan dan untuk menentukan kebijakan fiskalnya sendiri (Segura, 2018:6).

3. *Ketidaksepakatan Politik, Serta Masalah Kelembagaan dan Hukum Antara Catalunya dan Spanyol*

Ketidaksepakatan antara dua pihak dapat diselesaikan melalui negosiasi dan kompromi antara negara dan kawasan, dengan kedua belah pihak bekerja sama untuk menemukan solusi yang dapat diterima bersama. Namun, jika ketidaksepakatan itu mendalam atau melibatkan masalah mendasar seperti identitas, otonomi, atau integritas wilayah, hal itu berpotensi meningkat menjadi konflik yang lebih serius dan mendalam. Jika suatu negara dan salah satu wilayahnya berselisih tentang sesuatu, hal tersebut tentu dapat menimbulkan berbagai konsekuensi tergantung pada sifat dan tingkat ketidaksepakatan tersebut. Hal ini dapat menimbulkan gejolak politik, sosial, dan ekonomi, serta berpotensi memicu tantangan hukum dan kelembagaan baik di dalam negeri maupun internasional. Hasil dari ketidaksepakatan tersebut akan bergantung kepada berbagai faktor, termasuk kemauan politik dan kapasitas negosiasi kedua belah pihak, serta dukungan atau penentangan dari pemangku kepentingan lainnya, seperti wilayah lain atau aktor eksternal (Buchanan, 1997:301).

Gerakan dari kemerdekaan Catalunya telah mengajukan sejumlah tantangan hukum, termasuk juga hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk memilih kemerdekaan, dan menuntut legalitas kepada pemerintah Spanyol terhadap referendum kemerdekaan. Tantangan-tantangan ini telah menyebabkan pertempuran hukum dan kasus pengadilan baik di dalam negeri maupun internasional. Gerakan kemerdekaan juga menantang legitimasi institusi Spanyol, seperti peradilan, polisi, dan media. Pemerintah Catalan menuduh pemerintah Spanyol menggunakan institusi ini untuk menekan gerakan kemerdekaan dan melanggar hak-hak warga Catalan. Gerakan kemerdekaan Catalan juga telah mempengaruhi hubungan regional dan internasional, karena wilayah lain di Spanyol dan negara lain di seluruh dunia telah mempertimbangkan masalah ini. Gerakan kemerdekaan telah membuat tegang hubungan antara Catalunya dan pemerintah Spanyol, serta antara Catalunya dan daerah lain di Spanyol. Ini juga menimbulkan pertanyaan tentang masa depan Uni Eropa dan prinsip integritas teritorial (Guibernau, 2013:11).

Hubungan antara Catalunya dan sistem peradilan Spanyol telah lama menjadi isu yang diperdebatkan, dengan beberapa orang Catalan berpendapat bahwa sistem tersebut bias terhadap mereka. Argumen ini menjadi terkenal dalam beberapa tahun terakhir, karena beberapa politisi dan aktivis Catalan telah dipenjara atas tuduhan penghasutan dan pemberontakan. Kritik terhadap sistem peradilan Spanyol menunjukkan apa yang mereka lihat sebagai pola penuntutan bermotivasi politik dan hukuman keras terhadap pemimpin kemerdekaan Catalunya. Mereka berpendapat bahwa sistem tersebut tidak memihak dan dipengaruhi oleh tekanan politik dari pemerintah Spanyol. Pemenjaraan mantan Wakil Presiden Catalan Oriol Junqueras dan beberapa politisi dan aktivis Catalan terkemuka lainnya telah menjadi kasus yang sangat kontroversial. Junqueras dijatuhi hukuman 13 tahun penjara karena perannya dalam mengatur referendum kemerdekaan Catalan 2017, yang dianggap ilegal oleh pemerintah Spanyol (Jose, 2019).

Pendukung gerakan kemerdekaan melihat hukuman itu bermotif politik dan upaya untuk menekan keinginan demokratis rakyat Catalan. Mereka berpendapat bahwa pemerintah Spanyol telah menggunakan sistem peradilan sebagai alat untuk membungkam gerakan tersebut dan

bahwa hukuman tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi.

Pandangan Hukum Internasional (The Rights of Self Determination), Konstitusi Spanyol 1978 dalam Analisa Terkait Kegagalan Referendum Catalunya Atas Spanyol serta Wacana Untuk Mengamandemen Konstitusi Spanyol 1978

Perlindungan terhadap penduduk sipil ini diatur secara rinci dalam Konvensi Jenewa IV (*Geneva Convention*), Hukum internasional adalah kumpulan aturan dan prinsip yang mengatur hubungan antara negara dan aktor internasional lainnya, dan menyediakan kerangka kerja untuk menyelesaikan perselisihan dan mempromosikan kerjasama antar negara. Salah satu prinsip utama hukum internasional yang relevan dengan pemisahan Catalunya adalah prinsip integritas teritorial. Prinsip ini menyatakan bahwa negara memiliki hak untuk mempertahankan batas-batas wilayahnya dan bahwa pemisahan atau perubahan wilayah harus disetujui oleh semua pihak yang terlibat. Prinsip penentuan nasib sendiri adalah prinsip penting lain dari hukum internasional yang relevan dengan pemisahan Catalunya (Torroja, 2019).

Prinsip ini menyatakan bahwa orang memiliki hak untuk menentukan status politik mereka sendiri dan mengejar pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya mereka. Isu kemerdekaan Catalunya dari Spanyol juga menimbulkan pertanyaan tentang peran organisasi internasional seperti PBB dalam menangani perselisihan tersebut. Piagam PBB menjunjung tinggi prinsip integritas teritorial dan penentuan nasib sendiri, tetapi juga mengakui pentingnya mempromosikan perdamaian dan keamanan internasional. Dalam analisis ini digunakan beberapa Instrumen dan Hukum Internasional yang relevan dengan analisis penentuan nasib sendiri Catalunya antara lain; Piagam PBB, Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik, Konvensi Montevideo tentang hak dan kewajiban negara, pendapat Penasihat Mahkamah Internasional tentang Deklarasi Kemerdekaan Kosovo, serta Konstitusi Spanyol

1. Rujukan Konvensi Montevideo 1933 Terhadap Kegagalan Referendum Catalunya

Konvensi Montevideo merupakan salah satu instrumen hukum internasional yang dianggap sebagai salah satu yang terpenting dalam hukum internasional. Konvensi Montevideo merupakan perjanjian internasional yang membahas Hak dan Kewajiban Negara yang ditandatangani di Montevideo, Uruguay pada tanggal 26 Desember 1933. Dianggap sebagai salah satu yang terpenting karena menetapkan kriteria kenegaraan dan mengatur hak dan kewajiban negara berdaulat. Konvensi Montevideo 1933 adalah instrumen hukum internasional utama yang dinilai menyediakan kerangka kerja untuk menganalisis masalah rencana kemerdekaan Catalunya dari Spanyol. Konvensi Montevideo 1933 menetapkan kriteria kenegaraan, termasuk populasi permanen, wilayah yang ditentukan, pemerintahan, dan kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain (Mark, 2017).

Konvensi Montevideo dalam prakteknya digunakan oleh pendukung dan penentang kemerdekaan Catalunya. Pendukung berpendapat bahwa Catalunya memenuhi kriteria kenegaraan di bawah Konvensi dan karena itu memiliki hak untuk memisahkan diri dari Spanyol. Para penentang berpendapat bahwa Konvensi juga menjunjung tinggi prinsip integritas teritorial dan pemisahan diri harus disetujui oleh semua pihak yang terlibat. Catalunya dinilai tidak memenuhi persyaratan terhadap ketentuan pembentukan sebuah negara yang harus mendapatkan persetujuan atau pengakuan dari negara lain, Konvensi Montevideo 1933 dalam prakteknya sering dikutip dalam diskusi mengenai penentuan nasib sendiri dan pemisahan diri karena membahas mengenai kriteria kenegaraan, termasuk populasi permanen, wilayah yang ditentukan, pemerintahan, kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain serta pengakuan dari negara lain. Pendukung dari gerakan kemerdekaan Catalunya mungkin berpendapat bahwa Catalunya memenuhi kriteria ini dan karena itu memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri (Mark, 2017).

Pemerintah Spanyol berpendapat bahwa konstitusi negara melarang gerakan separatis dan bahwa Catalunya tidak memenuhi kriteria kenegaraan menurut hukum internasional. Konstitusi

Spanyol yang diadopsi pada tahun 1978 menetapkan Spanyol sebagai monarki parlementer dengan sistem otonomi daerah. Namun, juga sekaligus mencakup ketentuan yang melarang gerakan separatis, seperti yang terjadi di Catalunya. Pasal 2 Konstitusi yang menyatakan bahwa "Konstitusi didasarkan pada kesatuan bangsa Spanyol yang tak terpisahkan dari semua orang Spanyol. Ketentuan ini telah ditafsirkan oleh pengadilan Spanyol sebagai pelarangan gerakan separatis, termasuk di Catalunya. Terdapat perdebatan mengenai apakah Catalunya tunduk pada pembatasan negara atas pemisahan diri. Beberapa ahli berpendapat bahwa berdasarkan prinsip penentuan nasib sendiri, semua orang memiliki hak untuk menentukan status politiknya sendiri, termasuk hak untuk memisahkan diri. Namun, yang lain berpendapat bahwa prinsip integritas teritorial, yang melarang penggunaan kekerasan untuk mengubah perbatasan, juga merupakan aspek penting dari hukum internasional (Perera, 2018:86).

2. Rujukan Konstitusi Spanyol 1978 Terhadap Referendum Catalunya

Terkait Konstitusi Spanyol tahun 1978 memasukkan beberapa pasal yang telah ditafsirkan oleh pengadilan Spanyol sebagai pelarangan gerakan separatis, termasuk di Catalunya. Artikel-artikel ini meliputi:

1. Pasal 2: Pasal ini menyatakan bahwa "Konstitusi didasarkan pada kesatuan bangsa Spanyol yang tak terpisahkan, tanah air bersama dan tak terpisahkan dari semua orang Spanyol."
2. Pasal 8: Pasal ini menetapkan kewajiban angkatan bersenjata Spanyol, termasuk kewajiban mempertahankan keutuhan wilayah Spanyol.
3. Pasal 155: Pasal ini memungkinkan pemerintah pusat untuk campur tangan dalam urusan komunitas otonom, seperti Catalunya, dalam keadaan tertentu, termasuk ketika komunitas otonom gagal memenuhi kewajiban konstitusionalnya.
4. Pasal 168: Pasal ini menguraikan proses amandemen Konstitusi, yang membutuhkan dua pertiga suara mayoritas di kedua majelis Parlemen Spanyol, serta persetujuan Senat dan referendum.
5. Pasal 10: Pasal ini menetapkan prinsip-prinsip aturan hukum dan perlindungan hak dan kebebasan individu, yang dianggap mendasar bagi tatanan konstitusional Spanyol (Konstitusi Spanyol 1978).

Meskipun pasal-pasal ini telah digunakan untuk mencegah gerakan separatis, termasuk di Catalunya, pasal-pasal tersebut juga menjadi sasaran interpretasi dan perdebatan. Pasal-pasal Konstitusi Spanyol tahun 1978 yang digunakan untuk mencegah gerakan separatis, termasuk di Catalunya, menjadi sasaran interpretasi dan perdebatan karena mengangkat masalah hukum dan politik yang kompleks terkait kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, perlindungan hak dan kebebasan individu, dan prinsip penentuan nasib sendiri. (Krisch, 2017).

Di sisi lain, penentang ketentuan Konstitusi tentang integritas teritorial berpendapat bahwa prinsip penentuan nasib sendiri, yang juga diakui dalam hukum internasional, harus didahulukan dari ketentuan Konstitusi Spanyol tentang integritas teritorial. Mereka berpendapat bahwa wilayah seperti Catalunya harus memiliki hak untuk menentukan masa depan politik mereka sendiri, dan bahwa Konstitusi Spanyol harus diamandemen untuk memungkinkan proses pemisahan diri yang legal dan damai. Beberapa berpendapat bahwa prinsip penentuan nasib sendiri, yang diabadikan dalam hukum internasional, harus didahulukan dari ketentuan Konstitusi Spanyol tentang integritas teritorial. Yang lain berpendapat bahwa ketentuan Konstitusi tentang integritas teritorial sangat penting bagi stabilitas dan kesatuan negara Spanyol (Asier, 2017).

3. Wacana Amandemen Konstitusi Spanyol 1978 Dalam Asa Catalunya Menentukan Nasib Sendiri

Terdapat seruan dari beberapa politisi dan aktivis Catalunya untuk mengamandemen Konstitusi untuk mengizinkan pemisahan diri Catalunya. Namun, gagasan ini sangat kontroversial dan mendapat tantangan keras dari banyak pihak di Spanyol, termasuk pemerintah pusat dan daerah lain. Seperti yang telah disebutkan di awal, proses amandemen Konstitusi

Spanyol merupakan proses yang kompleks. Membutuhkan dukungan dari dua pertiga anggota kedua majelis Parlemen Spanyol, serta persetujuan dari dua pertiga parlemen daerah negara. Berarti bahwa setiap upaya untuk mengamandemen Konstitusi untuk mengizinkan pemisahan diri Catalunya akan membutuhkan konsensus politik yang luas, yang saat ini masih kurang.

Selain tantangan politik, ada juga rintangan hukum dan praktis untuk mengamandemen Konstitusi dengan cara ini. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa "persatuan tak terpisahkan" Spanyol adalah prinsip dasar Konstitusi yang tidak dapat diubah. Yang lain menunjukkan bahwa bahkan jika Konstitusi diamandemen, itu belum tentu mengarah pada pemisahan Catalunya, karena faktor lain seperti pengakuan internasional dan negosiasi dengan Spanyol juga diperlukan. Meskipun ada beberapa orang di Catalunya yang mendukung gagasan ini, kecil kemungkinannya untuk mendapatkan konsensus politik luas yang diperlukan untuk mewujudkannya (Camino, 2017:3).

Proses amandemen Konstitusi Spanyol untuk mengakomodasi pemisahan diri Catalunya dapat menjadi masalah yang kompleks dan kontroversial. Ada beberapa alasan mengapa mengamandemen Konstitusi Spanyol sangat menentang yang memungkinkan Catalunya memisahkan diri dari Spanyol. Perlindungan konstitusional atas integritas teritorial: Konstitusi Spanyol menegaskan "kesatuan yang tak terpisahkan" dari bangsa Spanyol, yang berarti bahwa integritas teritorial Spanyol dilindungi dan tidak dapat diganggu gugat. Ketentuan konstitusional ini menyulitkan amandemen Konstitusi untuk memungkinkan Catalunya memisahkan diri tanpa mengubah sistem politik Spanyol secara fundamental. Oposisi dari partai politik: Banyak partai politik di Spanyol, termasuk Partai Rakyat (PP) dan Partai Warga (Ciudadanos), sangat menentang kemerdekaan Catalunya dan tidak mungkin mendukung amandemen Konstitusi yang akan memfasilitasi pemisahan diri ini. Oposisi politik ini mempersulit penggalangan dukungan politik yang diperlukan untuk mengamandemen Konstitusi (Krisch, 2017).

Proses amandemen konstitusi: Proses amandemen Konstitusi Spanyol panjang dan rumit, membutuhkan persetujuan dua pertiga dari Kongres Deputi dan Senat, serta ratifikasi oleh pemerintah daerah otonom Spanyol. Hal ini membuat sulit untuk meloloskan amandemen Konstitusi, apalagi yang memungkinkan Catalunya memisahkan diri. Tantangan hukum: Bahkan jika Konstitusi Spanyol diubah untuk memungkinkan Catalunya memisahkan diri, kemungkinan akan ada tantangan hukum dari lawan yang berpendapat bahwa amandemen tersebut tidak konstitusional. Hal ini dapat menyebabkan pertarungan hukum yang panjang yang akan semakin memperumit proses pemisahan diri (Spanish Constitutional Court, 2012).

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai "Analisis Terhadap Kegagalan Referendum Catalunya (The Rights Of Self Determination) Terhadap Spanyol Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional", maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Faktor penyebab dari gerakan kemerdekaan Catalunya untuk memisahkan diri dari Spanyol dapat dikaitkan dengan kombinasi antara faktor otonomi, ekonomi dan politik yang mana wilayah Catalunya memiliki identitas yang berbeda dan sejarah otonomi yang panjang, yang telah membentuk bahasa, budaya, dan tradisinya yang unik. Terdapat ketidakpuasan terhadap sistem fiskal yang ada dan keinginan untuk memiliki negara sendiri yang berbentuk republik. Referendum Catalunya 2017 menjadi aksi dari keinginan ini namun otoritas Spanyol melalui raja Felipe IV menentang Gerakan ini dengan mutlak tidak mengizinkan adanya perpecahan berlandaskan pada Konstitusi 1978 yang menggagalkan referendum ini dan menjadikan wilayah Catalunya hingga saat ini masih menjadi bagian dari Spanyol.

2. Pandangan Hukum Internasional dan Konstitusi Spanyol terhadap kegagalan referendum penentuan nasib sendiri Catalunya dapat dilihat dari beberapa instrumen hukum internasional dan pasal-pasal yang terdapat pada Konstitusi Spanyol 1978. Prinsip penentuan nasib sendiri, yang diabadikan dalam berbagai instrumen hukum internasional mengakui hak Catalunya untuk secara bebas menentukan status politiknya, serta tertuang pada Pasal 2 Resolusi Umum PBB mengenai hak untuk menentukan nasib sendiri. Namun pelaksanaan hak tersebut harus dilakukan dalam kerangka tatanan hukum yang ada di suatu negara yang mana hal itu adalah Konstitusi Spanyol itu sendiri. Rakyat Catalunya ingin Pemerintah mengamandemen Konstitusi Spanyol 1978 namun mendapatkan banyak tentangan tidak hanya dari Spanyol namun dari wilayah lain.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan yakni masalah tersebut harus didasarkan pada penghormatan terhadap aturan hukum, prinsip demokrasi, dan hak semua pihak yang terlibat. Penting bahwa semua pihak yang terlibat dalam dialog dapat bekerja untuk menemukan solusi damai dan dapat diterima oleh bersama. Salah satu pendekatan yang memungkinkan untuk Catalunya dapat melakukan referendum adalah dengan melakukan pendekatan baik secara politik, diplomatik, dan konsuler kepada pemerintah Spanyol supaya mendapatkan persetujuan untuk melakukan referendum.

DAFTAR PUSTAKA

- A Kusumaatmadja, 2016. Hukum Internasional, Jurnal Hukum Diktum Volume. 14, No. 1. *American Journal Of International Law*, Vol. 74, No. 4.
- Adhinata, M. 2018. *Seperatisme Catalan: Symbolization of FC Barcelona, Nationalism and Political Identity*, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Identity No 9(1), pp.7-12.
- Anaya, James. 2004. *Indigenous Peoples in International Law*. New York: Oxford University Press.
- Asier, Munoz. 2017. "Catalan Independence in the Spanish Constitution and Courts" <https://oxcon.ouplaw.com/page/Catalan-independence>
- Broner, Alberto. 2018. The Political Economy of Catalonia's Secession Movement: *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 32, No. 4, Fall 2018.
- Buchanan, A. 1997. *Self Determination, Secession and The Rule of Law, The Morality Of Nationalism*. New York: Oxford University Press.
- Camino, Mortera. 2017. "Crunch Time in Catalonia: Why Spain Needs a Constitutional Overhaul" <https://www.cer.eu/insights/crunch-time-catalonia-why-spain-needs-constitutional-overhaul> (4 2 Mei 2023)
- Canetti, Tom. 2017. "Crunch Time in Catalonia: Why Spain Needs a Constitutional Overhaul" <https://www.cer.eu/insights/crunch-time-catalonia-why-spain-needs-constitutional-overhaul> (4 2 Mei 2023)
- Cataloniavotes. 2014. *Catalan history in 15 episodes*. Retrieved from <http://www.cataloniavotes.eu/history>
- Germa, Bel. The 1979 Statute of Autonomy and the Catalan Independence Movement, *Estudios de Economí Aplicada*, Vol. 32, No. 1, 2014.
- Guibernau, M. 2013. Prospects for an Independent Catalonia: *International Journal of Politics, Culture, and Society*, Vol 27, No, 5-22.
- Hannum, Hurst. 1980. *The Concept Of Autonomy in International Law, The*
- Jones, Sam. 2017. "Catalan Government Suspends Declaration Of Independence". <https://www.theguardian.com/world/2017/oct/10/catalan-government-suspends-declaration-of-independence> (3 Oktober 2022)
- Jose, Javier. 2013. *"The Independence of Catalonia: Jumping on a Bandwagon"*

- <https://blogs.lse.ac.uk/eurocrisispress/2013/09/30/the-independence-of-catalonia-jumping-on-a-bandwagon/>
- Krisch, Nico. 2017. "The Spanish Constitutional Crisis" <https://nicokrisch.net/2017/10/07/the-spanish-constitutional-crisis/>
- Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 138-155.
- Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2020). Penggunaan Media Sosial Secara Bijak Sebagai Penanggulangan Tindak Pidana Hate Speech Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 1(1), 57-62.
- Mark, Musings. 2017. "Catalonia's Declaration of Independence: Based on the International Law Criteria for Statehood, is its Declaration of Independence Valid?" <https://www.sportlawmusings.com/catalonia-declaration-of-independence>
- Mehreen, Khan. 2017. "The Economics of Catalan Secession". <https://www.ft.com/content/2c4aa308-aa63-11e7-ab55-27219df83c97>
- Perera, S. 2016. *Catalan Independence From The Perspective of International Law: Proceedings, 11th International Research Conference*.
- Preston, Paul. *The Rise and Fall of Catalan Self-Government: Journal of Democracy*, Vol. 29, No. 3, July 2018.
- Raic, David. 2002. *Statehood and the Law of Self – Determination*. United States: Kluwer Law International.
- Segura, Alex. 2018. *The Fiscal Balance of Catalonia Within Spain a Persistent Controversy: Regional & Federal Studies*, Vol. 28, No. 5, 2018.
- Tara, John. 2017. "Why Did Catalonia Just Vote For Independence From Spain". <https://time.com/5000205/catalonia-declares-independence/> (4 Oktober 2022)
- Torroja, Helena. 2019. "The Self Determination of Peoples Vs Human Rights in Liberal Democracies : The Case of Catalonia" <https://www.realinstitutoelcano.org/en/analyses/the-self-determination-of-peoples-vs-human-rights-in-liberal-democracies-the-case-of-catalonia/>
- Vila, Miquel. 2022. "Why Catalonia Failed, Pro independence protests in Catalonia". <https://www.palladiummag.com//2022/05/11/why-catalonia-failed/>
- Yulianti, N. P. R. (2016). Eksistensi Pidana Pengganti Denda Untuk Korporasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal IKA*, 14(1).
- Yulianti, N. P. R. (2019). Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 31-43.
- Yulianti, N. P. R. (2019). Legal Protection For Victims Of Criminal Violations (Case Study Of Violence Against Children In Buleleng District). *Veteran Law Review*, 2(2), 30-41.